

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN ADMINISTRASI

NOTA DINAS

Nomor 661/HM/08/2026/SU.04

Yth. : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Dari : Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Penyelarasan Draf Keputusan Kepala BPIP tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Tanggal : 28 Agustus 2026

Dengan hormat,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta untuk menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pengelolaan informasi publik, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - c. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
2. Pengelolaan dan penetapan Daftar Informasi Publik perlu dilaksanakan secara tertib, terkoordinasi, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa sehubungan dengan akan ditetapkannya Keputusan Kepala BPIP tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dipandang perlu dilakukan penyelarasan terhadap aspek hukum, redaksional, substansi, serta sistematika keputusan dimaksud agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tata naskah dinas, dan kondisi organisasi terkini.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak Kepala Biro Hukum dan Organisasi untuk:

1. Melakukan penelaahan dan penyelarasan terhadap Draf Keputusan Kepala BPIP tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila beserta lampirannya sebagaimana terlampir;
2. Memberikan masukan dan rekomendasi guna penyempurnaan draf keputusan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tata naskah dinas, serta kebijakan internal BPIP;

3. Apabila diperlukan, berkoordinasi dengan unit kerja terkait, termasuk PPID BPIP dan PPID Pelaksana, dalam rangka penyempurnaan substansi Daftar Informasi Publik dimaksud; dan
4. Menyampaikan hasil penyelarasan dan rekomendasi dimaksud untuk menjadi bahan penyempurnaan dan pertimbangan lebih lanjut dalam proses penetapan Keputusan Kepala BPIP tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Atas persetujuan dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Mahnan Marbawi

Tembusan:
Yth. Sekretaris Utama

**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SEKRETARIAT UTAMA**

NOTA DINAS

Nomor 165/HM/03/2026/SU.04

Yth. : Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Dari : Sekretaris Utama selaku Atasan PPID
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pengisian Daftar Informasi Publik
Tanggal : 16 Maret 2026

Dalam rangka pemutakhiran dan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai bagian dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik, bersama ini mohon masing-masing unit kerja untuk melakukan inventarisasi seluruh informasi publik yang dimiliki dan dikuasai.

Sehubungan dengan hal tersebut, setiap unit kerja dimohon untuk mengisi Daftar Inventarisasi Informasi Publik pada tautan <https://bit.ly/inventarisasiinformasiBPIP>. Format tabel serta petunjuk pengisian dapat dilihat pada Lampiran Nota Dinas ini. Daftar inventarisasi tersebut dapat kami terima paling lambat **6 April 2026**.

Daftar Informasi Publik yang disampaikan oleh unit kerja agar mengacu pada daftar data dalam kerangka Satu Data BPIP sebagaimana telah dikoordinasikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatekin), guna memastikan keselarasan, konsistensi, serta integrasi pengelolaan data dan informasi di lingkungan BPIP.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Tonny Agung Arifianto

Tembusan:

1. Kepala
2. Wakil Kepala
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

Lampiran Nota Dinas
Sekretaris Utama
Nomor : 165/HM/03/2026/SU.04
Tanggal : 16 Maret 2026

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR INVENTARISASI INFORMASI PUBLIK

A. Format Tabel

NO.	INFORMASI	TAHUN PEMBUATAN	JENIS DOKUMEN	SIFAT DOKUMEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<i>Contoh: Laporan Kinerja Tahun 2025</i>	<i>2026</i>	<i>Softcopy dan Hardcopy</i>	<i>Terbuka</i>
2	<i>Hasil Medical Check Up Pegawai</i>	<i>2026</i>	<i>Softcopy</i>	<i>Rahasia</i>
3	<i>Dokumen kerja sama</i>	<i>2026</i>	<i>Softcopy dan Hardcopy</i>	<i>Terbatas</i>
dst.				

B. Petunjuk Pengisian

- Kolom (1) – No.
Diisi dengan nomor urut daftar informasi publik.
- Kolom (2) – Informasi
Diisi dengan nama atau judul informasi/dokumen yang dimiliki oleh unit kerja, misalnya:
 - Laporan Kinerja Unit Kerja
 - Dokumen Program dan Kegiatan
 - Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - Laporan Keuangan *Audited*
 - Data statistik kegiatan
- Kolom (3) – Tahun Pembuatan
Diisi dengan tahun pembuatan atau tahun diterbitkannya dokumen/informasi tersebut.
- Kolom (4) – Jenis Dokumen
Diisi dengan bentuk dokumen atau media informasi, misalnya *Hardcopy* atau *Softcopy* (PDF, Word, Excel, dll.).
- Kolom (5) – Sifat Dokumen
Diisi dengan klasifikasi keterbukaan informasi, misalnya:
 - Terbuka untuk publik;
 - Terbatas; atau
 - Rahasia



Tonny Agung Arifianto

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN ADMINISTRASI

NOTA DINAS

Nomor 175/HM/03/2026/SU.04

Yth. : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Dari : Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan
Administrasi selaku PPID
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Dokumen Informasi Publik
Tanggal : 31 Maret 2026

Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut.

1. Mohon kiranya Biro Perencanaan dan Keuangan dapat menyampaikan dokumen informasi publik yang dimiliki dan dikuasai unit kerja Bapak sesuai dengan daftar terlampir.
2. Dokumen dimaksud akan digunakan untuk pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) serta publikasi melalui laman PPID BPIP dan media sosial resmi BPIP secara berkala.
3. Penyampaian dokumen diharapkan dapat dilakukan paling lambat pada tanggal 6 April 2026 melalui tautan berikut <https://files.bpip.go.id/index.php/s/kGXtDXxszdFP2z>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.



Mahnan Marbawi

Tembusan:

Yth. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID

Lampiran Nota Dinas
Kepala Biro Fasilitas Pimpinan,
Hubungan Masyarakat, dan
Administrasi
Nomor : 175/HM/03/2026/SU.04
Tanggal : 31 Maret 2026

DAFTAR DOKUMEN INFORMASI PUBLIK

NO	INFORMASI	TAHUN PEMBUATAN	JENIS DOKUMEN
(1)	(2)	(3)	(4)
Biro Perencanaan dan Keuangan			
1	Dokumen program/kegiatan tahun 2026	2026	Softcopy/Hardcopy
2	Dokumen program/kegiatan strategis tahun 2026	2026	Softcopy/Hardcopy
3	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas	2026	Softcopy/Hardcopy
4	Ringkasan kinerja program/kegiatan	2026	Softcopy/Hardcopy
5	Dokumen laporan tahun 2025	2026	Softcopy/Hardcopy
6	Laporan keuangan tahun 2025 (<i>audited</i>)	2026	Softcopy/Hardcopy
7	RKA 2026	2026	Softcopy/Hardcopy
8	DIPA 2026	2026	Softcopy/Hardcopy
9	Realisasi/penyerapan anggaran tahun 2026 triwulan pertama	2026	Softcopy/Hardcopy
10	Dokumen rencana strategis Kementerian/Lembaga/Badan yang masih berlaku	2026	Softcopy/Hardcopy



Mahnar Marbawi

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN ADMINISTRASI

NOTA DINAS

Nomor 174/HM/03/2026/SU.04

Yth. : Kepala Biro Umum dan SDM
Dari : Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan
Administrasi selaku PPID
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Dokumen Informasi Publik
Tanggal : 31 Maret 2026

Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut.

1. Mohon kiranya Biro Umum dan SDM dapat menyampaikan dokumen informasi publik yang dimiliki dan dikuasai unit kerja Bapak sesuai dengan daftar terlampir.
2. Dokumen dimaksud akan digunakan untuk pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) serta publikasi melalui laman PPID BPIP dan media sosial resmi BPIP secara berkala.
3. Penyampaian dokumen diharapkan dapat dilakukan paling lambat pada tanggal 6 April 2026 melalui tautan berikut <https://files.bpip.go.id/index.php/s/MeSWaFdgFGEjW5p>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.



Mahnan Marbawi

Tembusan:

Yth. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID

Lampiran Nota Dinas
Kepala Biro Fasilitas Pimpinan,
Hubungan Masyarakat, dan
Administrasi
Nomor : 174/HM/03/2026/SU.04
Tanggal : 31 Maret 2026

DAFTAR DOKUMEN INFORMASI PUBLIK

NO	INFORMASI	TAHUN PEMBUATAN	JENIS DOKUMEN
(1)	(2)	(3)	(4)
Bagian Umum			
1	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang telah selesai pekerjaan dan serah terima Tahun 2025 – 2026 (minimal 2 paket dan berkesesuaian antar tahapan)	2025-2026	<i>Softcopy/Hardcopy</i>
a	Dokumen Rencana Umum Pengadaan sesuai Pasal 14 ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021	2025-2026	<i>Softcopy/Hardcopy</i>
b	Dokumen-dokumen Tahap Pemilihan sesuai Pasal 14 ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021, minimal 5 jenis dokumen berbeda dalam 1 paket pekerjaan.	2025-2026	<i>Softcopy/Hardcopy</i>
c	Dokumen-dokumen Tahap Pelaksanaan sesuai Pasal 14 ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021, minimal 5 jenis dokumen berbeda dalam 1 paket pekerjaan.	2025-2026	<i>Softcopy/Hardcopy</i>
2	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya tahun 2025-2026	2025-2026	<i>Softcopy/Hardcopy</i>
3	Data perbendaharaan atau inventaris 2025- 2026	2026	<i>Softcopy/Hardcopy</i>
4	MENGUMUMKAN INFORMASI TAHAP PERENCANAAN		
a	Kementerian/Lembaga/Badan mengumumkan rencana umum pengadaan melalui SIRUP atau sejenisnya Tahun 2026	2026	<i>Link dan screenshot</i>
b	Sebutkan 2 (dua) rencana pengadaan dalam SIRUP atau sejenisnya Tahun 2026	2026	<i>Dokumen, Link, dan screenshot</i>
i	Nama Paket dan Pagu Nilai Paket tertinggi	2026	
ii	Nama Paket dan Pagu Nilai Paket tertinggi	2026	
c	Sebutkan 2 (dua) pelelangan dalam LPSE atau sejenisnya Tahun 2026		<i>Dokumen, Link, dan screenshot</i>
i	Nama Paket dan Pagu Nilai Paket tertinggi	2026	

ii	Nama Paket dan Pagu Nilai Paket tertinggi	2026	
5	MENGUMUMKAN INFORMASI TAHAP PEMILIHAN (Hanya dokumen yang relevan atau sesuai persyaratan dengan Paket Pengadaan Barang dan Jasa baik metode lelang/nonlelang selain e-purchasing. Bila paket pekerjaan tidak mensyaratkan hal tertentu, PPID menuliskan “TIDAK RELEVAN/TIDAK DIPERSYARATKAN”)		
	Kementerian/Lembaga/Badan menguasai dan mengumumkan dokumen pengadaan jasa dan barang 2 paket tertinggi yang telah selesai pemilihan atau selesai lelang Tahun 2026 dan memuat informasi tentang:		
a.	Paket 1 (sebutkan nama paket)	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
b.	Paket 2 (sebutkan nama paket)	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
i	Kerangka Acuan Kerja (KAK);	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
ii	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
iii	Spesifikasi Teknis;	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
iv	Rancangan Kontrak;	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
v	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
vi	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
vii	Daftar Kuantitas dan Harga;	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
viii	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
ix	Gambar Rancangan Pekerjaan;	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
x	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
xi	Dokumen Penawaran Administratif;	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
xii	Surat Penawaran Penyedia;	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
xiii	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>

	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;		
xiv	Berita Acara Pemberian Penjelasan;	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
xv	Berita Acara Pengumuman Negosiasi;	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
xvi	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
xvii	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
xviii	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
xix	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
6	MENGUMUMKAN TAHAP PELAKSANAAN ((Hanya dokumen yang relevan atau sesuai persyaratan dengan Paket Pengadaan Barang dan Jasa baik metode lelang/nonlelang selain e-purchasing. Bila paket pekerjaan tidak mensyaratkan hal tertentu, PPID menuliskan “TIDAK RELEVAN/TIDAK DIPERSYARATKAN”))		
	Kementerian/Lembaga/Badan menguasai dan mengumumkan dokumen pengadaan jasa dan barang 2 paket tertinggi yang telah selesai pelaksanaan atau serah terima pekerjaan Tahun 2026 dan memuat informasi tentang:		
a.	Paket 1 (sebutkan nama paket)	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
b.	Paket 2 (sebutkan nama paket)	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
i	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
ii	Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
iii	Surat Perintah Mulai Kerja	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
iv	Surat Jaminan Pelaksanaan	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan

			<i>screenshot</i>
v	Surat Jaminan Uang Muka	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
vi	Surat Jaminan Pemeliharaan	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
vii	Surat Tagihan	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
viii	Surat Perintah Membayar	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
ix	Surat Perintah Pencairan Dana	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
x	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
xi	Laporan Penyelesaian Pekerjaan	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
xii	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	2026	Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>
Bagian SDM			
1	Informasi penerimaan calon pegawai/pejabat negara		Dokumen, <i>Link</i> , dan <i>screenshot</i>



Mahnan Marbawi

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN ADMINISTRASI

NOTA DINAS

Nomor 172/HM/03/2026/SU.04

Yth. : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Dari : Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan
Administrasi selaku PPID
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Dokumen Informasi Publik
Tanggal : 31 Maret 2026

Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut.

1. Mohon kiranya Biro Hukum dan Organisasi dapat menyampaikan dokumen informasi publik yang dimiliki dan dikuasai unit kerja Bapak sesuai dengan daftar terlampir.
2. Dokumen dimaksud akan digunakan untuk pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) serta publikasi melalui laman PPID BPIP dan media sosial resmi BPIP secara berkala.
3. Penyampaian dokumen diharapkan dapat dilakukan paling lambat pada tanggal 6 April 2026 melalui tautan berikut <https://files.bpip.go.id/index.php/s/RabKYgp7ojFD6k8>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.



Mahnar Marbawi

Tembusan:

Yth. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID

Lampiran Nota Dinas
Kepala Biro Fasilitas Pimpinan,
Hubungan Masyarakat, dan
Administrasi
Nomor : 172/HM/03/2026/SU.04
Tanggal : 31 Maret 2026

DAFTAR DOKUMEN INFORMASI PUBLIK

NO	INFORMASI	TAHUN PEMBUATAN	JENIS DOKUMEN
(1)	(2)	(3)	(4)
Biro Hukum dan Organisasi			
1	Struktur organisasi	2023	<i>Softcopy/Hardcopy</i>
2	Daftar rancangan peraturan/kebijakan dalam proses	2025-2026	<i>Softcopy/Hardcopy</i>
3	Daftar peraturan/kebijakan telah disahkan	2025-2026	<i>Softcopy/Hardcopy</i>
4	Dokumen masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk	2025-2026	<i>Softcopy/Hardcopy</i>
5	Dokumen risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk	2025-2026	<i>Softcopy/Hardcopy</i>
	Informasi tentang tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Kementerian/Lembaga/Badan Tahun 2025-2026 yang sekurang-kurangnya terdiri dari:		
6	Dokumen rancangan peraturan, keputusan kebijakan yang dibentuk;	2025-2026	<i>Softcopy/Hardcopy</i>
7	Dokumen tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk;	2025-2026	<i>Softcopy/Hardcopy</i>
8	Dokumen peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.	2025-2026	<i>Softcopy/Hardcopy</i>
9	Dokumen pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil		<i>Softcopy/Hardcopy</i>



Mahnar Marbawi

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN ADMINISTRASI

NOTA DINAS

Nomor 171/HM/03/2026/SU.04

Yth. : Kepala Biro Pengawasan Internal
Dari : Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan
Administrasi selaku PPID
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Dokumen Informasi Publik
Tanggal : 31 Maret 2026

Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut.

1. Mohon kiranya Biro Pengawasan Internal dapat menyampaikan dokumen informasi publik yang dimiliki dan dikuasai unit kerja Bapak sesuai dengan daftar terlampir.
2. Dokumen dimaksud akan digunakan untuk pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) serta publikasi melalui laman PPID BPIP dan media sosial resmi BPIP secara berkala.
3. Penyampaian dokumen diharapkan dapat dilakukan paling lambat pada tanggal 6 April 2026 melalui tautan berikut <https://files.bpip.go.id/index.php/s/D9qbQ9WzLNCox5x>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.



Mahnar Marbawi

Tembusan:

Yth. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID

Lampiran Nota Dinas
Kepala Biro Fasilitas Pimpinan,
Hubungan Masyarakat, dan
Administrasi
Nomor : 171/HM/03/2026/SU.04
Tanggal : 31 Maret 2026

DAFTAR DOKUMEN INFORMASI PUBLIK

NO	INFORMASI	TAHUN PEMBUATAN	JENIS DOKUMEN
(1)	(2)	(3)	(4)
Biro Pengawasan Internal			
1	LHKPN Pimpinan tertinggi Badan Publik	2026	<i>Softcopy/Hardcopy</i>
2	LHKPN Pejabat Eselon I dan II	2025-2026	<i>Softcopy/Hardcopy</i>
3	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat	2025-2026	<i>Softcopy/Hardcopy</i>
4	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pihak lain	2025-2026	<i>Softcopy/Hardcopy</i>
5	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2025-2026	2025-2026	<i>Softcopy/Hardcopy</i>
6	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Wasnal secara langsung serta laporan penindakannya 2025-2026	2025-2026	<i>Softcopy/Hardcopy</i>



Mahnar Marbawi

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN ADMINISTRASI

NOTA DINAS

Nomor 489/HM/06/2026/SU.04

Yth. : Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPIP
Dari : Sekretaris Utama selaku Atasan PPID
Perihal : Tindak Lanjut Inventarisasi Daftar Informasi Publik dan Penyampaian Dokumen Pendukung
Tanggal : 18 Juni 2026

Dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor 165/HM/03/2026/SU.04 tanggal 16 Maret 2026 tentang Permohonan Pengisian Daftar Informasi Publik, serta sebagai upaya pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), perlu dilakukan penyempurnaan inventarisasi informasi publik beserta dokumen pendukungnya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, badan publik juga berkewajiban membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, ketersediaan Daftar Informasi Publik yang lengkap, mutakhir, dan didukung oleh dokumen yang valid dari seluruh unit kerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan BPIP, sekaligus sebagai bahan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan hasil inventarisasi sementara, jumlah daftar informasi yang telah disampaikan oleh masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut.

No.	Unit Kerja	Jumlah Daftar Informasi
1.	Biro Hukum dan Organisasi	22
2.	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	31
3.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	8
4.	Biro Perencanaan dan Keuangan	15
5.	Biro Pengawasan Internal	3

6.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	14
7.	Direktorat Hubungan Antarlembaga dan Kerjasama	Belum mengisi
8.	Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi	Belum mengisi
9.	Direktorat Jaringan dan Pembudayaan	Belum mengisi
10.	Direktorat Advokasi	2
11.	Direktorat Analisis dan Penyelarasan	2
12.	Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi	4
13.	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	Belum mengisi
14.	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	Belum mengisi
15.	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	Belum mengisi
16.	Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Belum mengisi
17.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	Belum mengisi
18.	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Belum mengisi
19.	Direktorat Evaluasi	Belum mengisi
20.	Direktorat Pengendalian	Belum mengisi
21.	Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila	Belum mengisi

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada seluruh unit kerja untuk:

1. melakukan penyempurnaan dan pemutakhiran daftar informasi publik sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja;
2. bagi unit kerja yang belum menyampaikan daftar inventaris informasi publik, agar segera melakukan inventarisasi dan melengkapinya secara menyeluruh;
3. seluruh unit kerja menyediakan dokumen pendukung untuk setiap daftar informasi yang telah diinventarisasi;
4. mengunggah dokumen pendukung tersebut ke dalam Google Drive masing-masing unit kerja;
5. mencantumkan tautan (*link*) Google Drive pada kolom Tabel Daftar Inventarisasi Informasi dalam Google Spreadsheet berikut <https://bit.ly/inventarisasiinformasiBPIP> sesuai dengan baris daftar informasinya sehingga setiap daftar informasi dapat diverifikasi melalui dokumen pendukung yang tersedia;
6. memastikan bahwa dokumen yang diunggah merupakan dokumen terbaru, lengkap, dan sesuai dengan klasifikasi keterbukaan informasi publik yang berlaku.

Seluruh proses penyempurnaan inventarisasi informasi publik beserta pengunggahan dokumen pendukung dan pencantuman tautannya agar diselesaikan paling lambat pada hari Selasa, 30 Juni 2026, guna mendukung penyusunan Daftar Informasi Publik BPIP, penyelenggaraan layanan informasi publik, serta pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tonny Agung Arifianto

Tembusan:

1. Kepala
2. Wakil Kepala
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk menjamin tersedianya informasi publik yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);
 8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 9. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 269 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Memperhatikan : Hasil inventarisasi dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik yang disampaikan oleh unit kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI

KESATU Menetapkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini.

- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta unit kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam menyediakan, memberikan, mengumumkan, mendokumentasikan, dan melayani permohonan informasi publik.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat; informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Unit kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang menguasai dan/atau menghasilkan informasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Informasi Publik bertanggung jawab atas ketersediaan, keakuratan, kelengkapan, dan kemutakhiran informasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan informasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam hal terdapat informasi yang belum tercantum dalam Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, penetapan mengenai klasifikasi informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pengelolaan informasi publik di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KETUJUH : Penetapan dan pengelolaan informasi yang dikecualikan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kepatutan, kepentingan umum, serta hasil pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimohonkan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2026

KEPALA,

$\text{\$}{\text{ttd_pengirim}}$

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/ UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPA NAN ATAU RETENSI ARSIP
A. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA							
I. Sekretariat Utama							
a. Informasi tentang Badan Publik							
1	Kedudukan /Domisili beserta alamat lengkap	Berisi tentang kedudukan, domisili, alamat lengkap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Sekretariat Utama/Biro Umum dan SDM	PPID BPIP	2018, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
2	Visi & Misi	Memuat informasi mengenai Visi dan Misi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Sekretariat Utama	PPID BPIP	2018, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

3	Tugas Dan Fungsi	Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018	Sekretariat Utama	PPID BPIP	2018, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
4	Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Fungsi	Memuat informasi mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang, dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Sekretariat Utama	PPID BPIP	2018, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
5	Profil Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Memuat informasi mengenai profil Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Sekretariat Utama	PPID BPIP	2018, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
6	LHKPN	Menyajikan hasil pemeriksaan LHKPN : Kepala, Wakil Kepala, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPIP	Sekretariat Utama	PPID BPIP	2018, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
b. Biro Hukum dan Organisasi							

7	Informasi tentang Peraturan	Informasi mengenai peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.	Biro Hukum dan Organisasi	PPID/Kepala Biro Hukum dan Organisasi	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
8	Informasi tentang Keputusan	Informasi mengenai keputusan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang di lingkungan BPIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.	Biro Hukum dan Organisasi	PPID/Kepala Biro Hukum dan Organisasi	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
9	Rancangan Produk Hukum	Informasi mengenai proses penyusunan dan substansi rancangan produk hukum yang disiapkan oleh BPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Biro Hukum dan Organisasi	PPID/Kepala Biro Hukum dan Organisasi	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
10	Informasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Informasi mengenai kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pendokumentasian, dan penyebarluasan dokumentasi serta	Biro Hukum dan Organisasi	PPID/Kepala Biro Hukum dan Organisasi	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku

		informasi hukum melalui JDIH BPIP.					
11	Informasi tentang Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum	Informasi mengenai hasil penilaian dan capaian BPIP dalam pelaksanaan Reformasi Hukum berdasarkan indikator Indeks Reformasi Hukum.	Biro Hukum dan Organisasi	PPID/Kepala Biro Hukum dan Organisasi	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
12	Informasi tentang Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan	Informasi mengenai hasil penilaian kualitas kebijakan yang disusun dan/atau dilaksanakan oleh BPIP berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.	Biro Hukum dan Organisasi	PPID/Kepala Biro Hukum dan Organisasi	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
13	Naskah Kerja Sama	Informasi mengenai dokumen dan naskah kerja sama yang disusun atau dilaksanakan BPIP dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan/atau pihak terkait lainnya.	Biro Hukum dan Organisasi	PPID/Kepala Biro Hukum dan Organisasi	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
14	Sosialisasi Produk Hukum	Informasi mengenai kegiatan penyebaran, pemahaman, dan sosialisasi produk	Biro Hukum dan Organisasi	PPID/Kepala Biro Hukum dan Organisasi	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku

		hukum kepada pegawai, pemangku kepentingan, dan/atau masyarakat.					
15	Analisis dan Evaluasi Produk Hukum	Informasi mengenai kegiatan analisis, pengkajian, dan evaluasi terhadap produk hukum dalam rangka memastikan kesesuaian, efektivitas, dan harmonisasi peraturan.	Biro Hukum dan Organisasi	PPID/Kepala Biro Hukum dan Organisasi	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
16	Putusan	Informasi mengenai putusan lembaga peradilan atau instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kepentingan BPIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Biro Hukum dan Organisasi	PPID/Kepala Biro Hukum dan Organisasi	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
17	Monografi Hukum	Informasi berupa karya tulis atau kajian ilmiah yang membahas suatu topik, isu, atau permasalahan	Biro Hukum dan Organisasi	PPID/Kepala Biro Hukum dan Organisasi	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku

		hukum secara komprehensif.					
18	Artikel/Majalah Hukum	Informasi berupa artikel, publikasi, atau majalah yang memuat pengetahuan, perkembangan, kajian, dan isu aktual di bidang hukum.	Biro Hukum dan Organisasi	PPID/Kepala Biro Hukum dan Organisasi	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
19	Terjemahan Dokumen Hukum	Informasi berupa hasil penerjemahan dokumen hukum yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.	Biro Hukum dan Organisasi	PPID/Kepala Biro Hukum dan Organisasi	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
20	Informasi tentang pengelolaan organisasi	Informasi mengenai kebijakan, kegiatan, dan pelaksanaan pengelolaan organisasi dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi tata kelola BPIP.	Biro Hukum dan Organisasi	PPID/Kepala Biro Hukum dan Organisasi	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
21	Informasi tentang penilaian Reformasi Birokrasi	Informasi mengenai pelaksanaan, hasil penilaian, capaian, dan tindak lanjut Reformasi Birokrasi di lingkungan BPIP.	Biro Hukum dan Organisasi	PPID/Kepala Biro Hukum dan Organisasi	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku

22	Laporan kinerja pada Biro Hukum dan Organisasi	Informasi mengenai capaian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi.	Biro Hukum dan Organisasi	PPID/Kepala Biro Hukum dan Organisasi	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
23	Laporan per kegiatan	Informasi mengenai pelaksanaan dan hasil setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi.	Biro Hukum dan Organisasi	PPID/Kepala Biro Hukum dan Organisasi	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
24	Laporan triwulan	Informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program, kegiatan, dan capaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi dalam periode triwulanan.	Biro Hukum dan Organisasi	PPID/Kepala Biro Hukum dan Organisasi	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
25	Laporan tahunan	Informasi mengenai pelaksanaan program, kegiatan, capaian kinerja, serta evaluasi pelaksanaan tugas Biro Hukum dan Organisasi dalam satu tahun.	Biro Hukum dan Organisasi	PPID/Kepala Biro Hukum dan Organisasi	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku

26	Daftar Arsip Aktif dan Inaktif	Informasi mengenai daftar arsip aktif dan arsip inaktif yang dikelola sesuai dengan ketentuan kearsipan dan klasifikasi arsip yang berlaku.	Biro Hukum dan Organisasi	PPID/Kepala Biro Hukum dan Organisasi	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
c. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia							
27	Laporan Kegiatan Layanan Pengadaan Triwulan 2025	Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan layanan pengadaan barang dan jasa BPIP serta capaian pelaksanaannya dalam periode triwulan tahun 2025.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
28	Laporan Kegiatan Layanan Pengadaan Tahunan 2025	Informasi mengenai pelaksanaan, capaian, dan evaluasi kegiatan layanan pengadaan barang dan jasa BPIP selama tahun 2025.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
29	Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa	Informasi mengenai pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BPIP sesuai dengan ketentuan peraturan	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku

		perundang-undangan.					
30	Laporan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Informasi mengenai perencanaan kebutuhan dan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BPIP yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
31	Laporan Pengadaan Secara Elektronik Pencatatan Non Tender	Informasi mengenai pelaksanaan dan pencatatan proses pengadaan secara elektronik melalui metode non tender sesuai ketentuan yang berlaku.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
32	Laporan Pengadaan Secara Elektronik Non Tender	Informasi mengenai pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan metode non tender di lingkungan BPIP.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
33	ITKP	Informasi mengenai hasil pengukuran dan/atau capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan dalam rangka menilai kualitas tata kelola	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku

		pengadaan barang dan jasa.					
34	Kematangan UKPBJ	Informasi mengenai hasil penilaian tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam penyelenggaraan fungsi pengadaan barang dan jasa.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
35	Jumlah JF PPBJ	Informasi mengenai jumlah pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) di lingkungan BPIP.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
36	Laporan Pengguna Barang Semester II TA 2025	Informasi mengenai pengelolaan dan kondisi Barang Milik Negara pada BPIP sebagai pengguna barang untuk periode Semester II Tahun Anggaran 2025.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
37	Laporan Pengguna Barang Audited TA 2025	Informasi mengenai laporan pengelolaan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2025 yang telah melalui proses audit sesuai ketentuan.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku

38	SK Unit Akuntansi Pengguna Barang TA 2026	Informasi mengenai penetapan Unit Akuntansi Pengguna Barang di lingkungan BPIP untuk pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
39	SK Penyimpan Barang TA 2026	Informasi mengenai penetapan pejabat atau pegawai yang ditugaskan sebagai penyimpan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
40	SK Inventarisasi dan Penghapusan TA 2026	Informasi mengenai penetapan tim atau pejabat yang bertugas melaksanakan inventarisasi dan penghapusan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
41	Daftar Barang Ruang	Informasi mengenai daftar dan penempatan Barang Milik Negara yang berada pada setiap ruang di lingkungan BPIP.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku

42	SK Tim Persediaan	Informasi mengenai penetapan tim yang bertugas melakukan pengelolaan, pencatatan, dan pengawasan persediaan di lingkungan BPIP.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
43	SOP Peminjaman Ruang Rapat	Informasi mengenai prosedur dan tata cara peminjaman serta penggunaan ruang rapat di lingkungan BPIP.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
44	Dokumentasi Jamuan Rapat	Informasi berupa dokumentasi pelaksanaan penyediaan jamuan dalam kegiatan rapat dan kegiatan kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
45	Data Kepegawaian	Informasi mengenai data dan profil kepegawaian di lingkungan BPIP yang dapat dibuka kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2026, Jakarta	Luring	Selama Berlaku

46	Draft Dokumen HCDP	Informasi mengenai rancangan dokumen perencanaan pengembangan sumber daya manusia sebagai dasar pengelolaan dan pengembangan kompetensi pegawai.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2026, Jakarta	Luring	Selama Berlaku
47	SK Tim Kajian Pembentukan Pusat Pengembangan Kompetensi	Informasi mengenai penetapan tim yang bertugas melakukan kajian pembentukan Pusat Pengembangan Kompetensi di lingkungan BPIP.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
48	SK Tim Kajian Pembentukan Pusat Penilaian Kompetensi	Informasi mengenai penetapan tim yang bertugas melakukan kajian pembentukan Pusat Penilaian Kompetensi di lingkungan BPIP.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
49	Dokumen Pengajuan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	Informasi mengenai dokumen dan proses pengajuan pembayaran gaji serta tunjangan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2026, Jakarta	Luring	Selama Berlaku

50	Dokumen Mutasi dan Pemberhentian ASN	Informasi mengenai pelaksanaan administrasi mutasi dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2026, Jakarta	Luring	Selama Berlaku
51	Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai	Informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas dan profesionalitas ASN.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
52	Dokumen Kesejahteraan Pegawai	Informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan program kesejahteraan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2025, Jakarta	Luring	Selama Berlaku
53	Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	Informasi mengenai pelaksanaan sistem dan proses penilaian kinerja pegawai di lingkungan BPIP	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2025, Jakarta	Luring	Selama Berlaku

		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
54	Dokumen Sosialisasi Penegakan Kode Etik dan Disiplin Pegawai	Informasi mengenai kegiatan sosialisasi ketentuan kode etik, disiplin, dan penegakan aturan perilaku pegawai di lingkungan BPIP.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
55	Sosialisasi Aplikasi Presensi	Informasi mengenai kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi presensi bagi pegawai dalam mendukung tertib administrasi dan pengelolaan kehadiran.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
56	Draft Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Informasi mengenai rancangan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai dasar penataan organisasi dan kebutuhan sumber daya manusia.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2025, Jakarta	Luring	Selama Berlaku
57	Dokumen Peta Jabatan	Informasi mengenai susunan dan pemetaan jabatan di lingkungan BPIP berdasarkan	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku

		struktur organisasi, tugas, dan fungsi jabatan.					
58	Dokumen Persetujuan Formasi Jabatan Fungsional	Informasi mengenai persetujuan kebutuhan dan formasi jabatan fungsional di lingkungan BPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2025, Jakarta	Luring	Selama Berlaku
59	Dokumen Pengadaan Pegawai	Informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan proses pengadaan pegawai di lingkungan BPIP sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2025, Jakarta	Luring	Selama Berlaku
60	Dokumen Rencana Kebutuhan Pegawai	Informasi mengenai perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	2025, Jakarta	Luring	Selama Berlaku
61	Draft Dokumen Standar	Informasi mengenai rancangan standar kompetensi jabatan	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	PPID/Kepala Biro Umum	2026, Jakarta	Luring	Selama Berlaku

	Kompetensi Jabatan	sebagai acuan dalam pengelolaan, pengembangan, dan penempatan pegawai sesuai kebutuhan organisasi.		dan Sumber Daya Manusia			
d. Biro Perencanaan dan Keuangan							
62	Laporan Kinerja Tahun 2025	Informasi mengenai capaian kinerja BPIP selama Tahun 2025, termasuk pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran strategis.	Biro Perencanaan dan Keuangan	PPID/Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
63	Laporan Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Informasi mengenai realisasi dan capaian pelaksanaan program serta kegiatan BPIP selama Tahun 2025.	Biro Perencanaan dan Keuangan	PPID/Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
64	Laporan Capaian Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025	Informasi mengenai perkembangan dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan BPIP pada Triwulan I Tahun 2025.	Biro Perencanaan dan Keuangan	PPID/Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
65	Laporan Capaian Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2025	Informasi mengenai perkembangan dan capaian pelaksanaan program dan	Biro Perencanaan dan Keuangan	PPID/Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku

		kegiatan BPIP pada Triwulan II Tahun 2025.					
66	Laporan Capaian Program dan Kegiatan Triwulan III Tahun 2025	Informasi mengenai perkembangan dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan BPIP pada Triwulan III Tahun 2025.	Biro Perencanaan dan Keuangan	PPID/Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
67	Laporan Capaian Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2026	Informasi mengenai perkembangan dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan BPIP pada Triwulan I Tahun 2026.	Biro Perencanaan dan Keuangan	PPID/Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
68	Rencana Stretegis BPIP Tahun 2025 - 2029	Informasi mengenai arah kebijakan, tujuan, sasaran strategis, program, dan indikator kinerja BPIP untuk periode Tahun 2025–2029.	Biro Perencanaan dan Keuangan	PPID/Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
69	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025	Informasi mengenai alokasi dan rencana penggunaan anggaran BPIP Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan.	Biro Perencanaan dan Keuangan	PPID/Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

70	Rencana Kerja BPIP Tahun 2025	Informasi mengenai rencana program, kegiatan, sasaran, dan target kinerja BPIP yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.	Biro Perencanaan dan Keuangan	PPID/Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
71	Perjanjian Kinerja BPIP Tahun 2025	Informasi mengenai kesepakatan target dan indikator kinerja sebagai komitmen pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran BPIP pada Tahun 2025.	Biro Perencanaan dan Keuangan	PPID/Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
72	Perjanjian Kinerja BPIP Tahun 2026	Informasi mengenai kesepakatan target dan indikator kinerja sebagai komitmen pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran BPIP pada Tahun 2026.	Biro Perencanaan dan Keuangan	PPID/Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
73	Pohon Kinerja BPIP	Informasi mengenai keterkaitan dan penjabaran sasaran, indikator, serta target kinerja BPIP dari tingkat organisasi hingga unit kerja sebagai dasar pengelolaan kinerja.	Biro Perencanaan dan Keuangan	PPID/Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

74	Laporan Monitoring Evaluasi Tahun 2025	Informasi mengenai hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian kinerja BPIP selama Tahun 2025.	Biro Perencanaan dan Keuangan	PPID/Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	2026, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
75	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026	Informasi mengenai alokasi dan rencana penggunaan anggaran BPIP Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan.	Biro Perencanaan dan Keuangan	PPID/Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	2026, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
76	Rencana Kerja BPIP Tahun 2026	Informasi mengenai rencana program, kegiatan, sasaran, dan target kinerja BPIP yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.	Biro Perencanaan dan Keuangan	PPID/Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	2026, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
e. Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi							
77	Kalender Kegiatan Pimpinan	Informasi mengenai jadwal dan agenda kegiatan pimpinan BPIP dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan.	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku

78	Program Kegiatan Berjalan BPIP Tahun 2026	Informasi mengenai program dan kegiatan BPIP yang sedang dilaksanakan pada Tahun 2026.	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
79	Dokumentasi Kegiatan	Informasi berupa dokumentasi foto, video, dan/atau materi visual kegiatan BPIP.	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
80	Jumlah Rilis Berita	Informasi mengenai jumlah rilis berita yang diproduksi dan dipublikasikan oleh BPIP dalam periode tertentu.	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
81	Publikasi Rilis	Informasi mengenai penyebarluasan dan publikasi rilis berita terkait program, kegiatan, dan kebijakan BPIP.	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
82	Laporan SKM	Informasi mengenai hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat,	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku

		pelayanan yang diberikan oleh BPIP.		dan Administrasi			
83	Laporan SP4N LAPOR	Informasi mengenai pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!).	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
84	Laporan Permohonan Informasi Publik	Informasi mengenai pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID BPIP.	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
85	Laporan Monev KIP	Informasi mengenai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPIP.	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
86	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Informasi mengenai komitmen BPIP dalam memberikan pelayanan informasi publik sesuai standar pelayanan dan ketentuan	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku

		peraturan perundang-undangan.					
87	SOP Permohonnan Informasi Publik	Informasi mengenai tata cara dan prosedur pelayanan permohonan informasi publik di lingkungan BPIP.	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
88	SOP Penanganan Keberatan	Informasi mengenai tata cara penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian keberatan atas pelayanan informasi publik.	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
89	SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP	Informasi mengenai prosedur penetapan, penyusunan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik BPIP.	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
90	SOP Pengujian Konsekuensi	Informasi mengenai prosedur pelaksanaan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan dari akses publik.	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku

91	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	Informasi mengenai tata cara pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan pendokumentasian informasi publik.	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
92	Daftar Informasi Publik Online	Informasi mengenai daftar informasi publik yang tersedia dan dapat diakses masyarakat melalui media elektronik atau website PPID BPIP.	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
93	SK PPID	Informasi mengenai penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPIP.	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
94	SK PPID Pelaksana dan Tim Pertimbangan	Informasi mengenai penetapan PPID Pelaksana dan Tim Pertimbangan dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik BPIP.	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
95	SK SKM	Informasi mengenai penetapan pelaksanaan Survei Kepuasan	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat,	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku

		Masyarakat sebagai instrumen evaluasi kualitas pelayanan BPIP.	dan Administrasi	Masyarakat, dan Administrasi			
96	Infografis Tata Cara Memperoleh Informasi Publik	Informasi visual mengenai prosedur dan tahapan yang dapat dilakukan masyarakat untuk memperoleh informasi publik dari BPIP.	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
97	Infografis Tata Cara Pengajuan Keberatan	Informasi visual mengenai prosedur dan tahapan pengajuan keberatan atas pelayanan informasi publik.	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
98	SK Daftar Informasi Publik	Informasi mengenai penetapan Daftar Informasi Publik yang dikuasai dan dikelola oleh BPIP.	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
99	Arsiparis Teladan (Artel) di Lingkungan BPIP Tahun 2025 (Visual Banner)	Informasi visual mengenai pelaksanaan dan/atau pemilihan Arsiparis Teladan di lingkungan BPIP Tahun 2025.	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

100	Hasil Monitoring Pemberkasan SRIKANDI Tahun 2025	Informasi mengenai hasil pemantauan pelaksanaan pemberkasan arsip melalui aplikasi SRIKANDI di lingkungan BPIP pada Tahun 2025.	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
101	Hasil Monitoring Pemberkasan SRIKANDI Tahun 2026 (Triwulan I)	Informasi mengenai hasil pemantauan pelaksanaan pemberkasan arsip melalui aplikasi SRIKANDI di lingkungan BPIP pada Triwulan I Tahun 2026.	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2026, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
102	Kilas Pameran Arsip Statis Elektronik Abdoel Gaffar Pringgodigdo (Materi)	Informasi berupa materi publikasi dan dokumentasi mengenai pameran arsip statis elektronik Abdoel Gaffar Pringgodigdo.	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
103	Kilas Pameran Arsip Statis Elektronik Abdoel Gaffar Pringgodigdo (Video)	Informasi berupa video dokumentasi dan publikasi mengenai pameran arsip statis elektronik Abdoel Gaffar Pringgodigdo.	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
104	Laporan Audit Pengawasan Kearsipan	Informasi mengenai hasil audit dan pengawasan	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan	PPID/Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan,	2023, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

	Eksternal (LAKE) BPIP Tahun 2023	kearsipan eksternal terhadap penyelenggaraan kearsipan BPIP Tahun 2023.	Masyarakat, dan Administrasi	Hubungan Masyarakat, dan Administrasi			
105	Laporan Audit Pengawasan Kearsipan Eksternal (LAKE) BPIP Tahun 2024	Informasi mengenai hasil audit dan pengawasan kearsipan eksternal terhadap penyelenggaraan kearsipan BPIP Tahun 2024.	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
106	Laporan Audit Pengawasan Kearsipan Eksternal (LAKE) BPIP Tahun 2025	Informasi mengenai hasil audit dan pengawasan kearsipan eksternal terhadap penyelenggaraan kearsipan BPIP Tahun 2025.	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
107	Laporan Audit Pengawasan Kearsipan Internal (LAKI) BPIP Tahun 2023	Informasi mengenai hasil audit dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan BPIP Tahun 2023.	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2023, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
108	Laporan Audit Pengawasan Kearsipan Internal (LAKI) BPIP Tahun 2024	Informasi mengenai hasil audit dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat,	PPID/Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat,	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

		penyelenggaraan kearsipan BPIP Tahun 2024.	dan Administrasi	dan Administrasi			
109	Laporan Audit Pengawasan Kearsipan Internal (LAKI) BPIP Tahun 2025	Informasi mengenai hasil audit dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan BPIP Tahun 2025.	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
110	Laporan Evaluasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) BPIP Tahun 2024	Informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di lingkungan BPIP Tahun 2024.	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2024	Daring	Selama Berlaku
111	Laporan Evaluasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) BPIP Tahun 2025	Informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di lingkungan BPIP Tahun 2025.	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
112	Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 3/KA/03/2025/S A tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di	Informasi mengenai pedoman dan tata cara pengelolaan arsip terjaga di lingkungan BPIP sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku.	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

	Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila						
113	Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 4/KA/10/2025/S U.04 tentang Panduan Pelaksanaan Seleksi Pemilihan Arsiparis Teladan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025	Informasi mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan seleksi serta pemilihan Arsiparis Teladan di lingkungan BPIP Tahun 2025.	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
114	Statistika Dashboard Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) oleh Simpul Jaringan (SJ) BPIP Tahun 2024	Informasi mengenai data statistik pengelolaan dan penyediaan arsip melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional oleh Simpul Jaringan BPIP Tahun 2024.	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
115	Statistika Dashboard Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) oleh Simpul Jaringan (SJ) BPIP Tahun 2025	Informasi mengenai data statistik pengelolaan dan penyediaan arsip melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional oleh Simpul Jaringan BPIP Tahun 2025.	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

116	Statistika Dashboard Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) oleh Simpul Jaringan (SJ) BPIP Tahun 2026	Informasi mengenai data statistik pengelolaan dan penyediaan arsip melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional oleh Simpul Jaringan BPIP Tahun 2026.	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2026, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
117	Video Informasi Statistik Capaian Unit Kearsipan BPIP Tahun 2025	Informasi berupa video yang menyajikan data dan statistik capaian kinerja Unit Kearsipan BPIP dalam penyelenggaraan kearsipan Tahun 2025.	Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID/Kepala Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
f. Biro Pengawasan Internal							
118	Jumlah Laporan Penerimaan Gratifikasi	Informasi mengenai jumlah laporan penerimaan gratifikasi yang diterima dan/atau ditindaklanjuti di lingkungan BPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Biro Pengawasan Internal	PPID/Kepala Biro Pengawasan Internal	2025/Berkala	Daring	Selama Berlaku
119	Nilai Maturitas Penyelenggaraan	Informasi mengenai hasil penilaian tingkat kematangan	Biro Pengawasan Internal	PPID/Kepala Biro	2025/Berkala	Daring	Selama Berlaku

	SPIP di Lingkungan BPIP	penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPIP sebagai gambaran efektivitas sistem pengendalian intern organisasi.		Pengawasan Internal			
120	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan	Informasi mengenai tingkat realisasi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan di lingkungan BPIP sebagai indikator capaian pelaksanaan fungsi pengawasan internal.	Biro Pengawasan Internal	PPID/Kepala Biro Pengawasan Internal	2025/Berkala	Daring	Selama Berlaku
g. Pusat Data dan Teknologi Informasi							
121	Daftar Aplikasi atau Website BPIP	Informasi mengenai daftar aplikasi dan website yang dikembangkan, dikelola, dan/atau digunakan oleh BPIP dalam mendukung pelaksanaan tugas, pelayanan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	PPID/Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

122	Daftar Aset TIK Pusdatekin	Informasi mengenai daftar aset Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas BPIP.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	PPID/Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
123	Daftar Feedback Website BPIP	Informasi mengenai masukan, saran, dan tanggapan pengguna terhadap website BPIP sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan digital.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	PPID/Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	2026, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
124	Daftar Produk Hukum yang diterbitkan oleh Pusdatekin	Informasi mengenai produk hukum yang diterbitkan atau menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Teknologi Informasi.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	PPID/Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	2026, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
125	Daftar Arsip Aktif dan Inaktif	Informasi mengenai daftar arsip aktif dan arsip inaktif yang dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi sesuai dengan ketentuan	Pusat Data dan Teknologi Informasi	PPID/Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	2026, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

		kearsipan yang berlaku.					
126	Daftar Naskah Dinas Pusdatekin	Informasi mengenai daftar naskah dinas yang diterbitkan dan/atau dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	PPID/Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	2026, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
127	Daftar Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan	Informasi mengenai daftar laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	PPID/Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	2026, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
128	Daftar Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Informasi mengenai dokumen perencanaan program, kegiatan, kebutuhan, dan anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam mendukung pencapaian sasaran BPIP.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	PPID/Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	2026, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
129	Laporan Capaian Kinerja Pusdatekin	Informasi mengenai pelaksanaan tugas, program, kegiatan, dan capaian kinerja	Pusat Data dan Teknologi Informasi	PPID/Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

		Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam periode tertentu.					
II. Deputi Bidang Hubungan Antarlembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan							
a. Direktorat Hubungan Antarlembaga dan Kerja Sama							
130	Nota Kesepahaman antara BPIP dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Sinergi Penguatan Nilai Pancasila dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (30 April 2026)	Informasi mengenai kesepahaman antara BPIP dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam membangun sinergi penguatan nilai-nilai Pancasila melalui program dan kegiatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.	Direktorat Hubungan Antarlembaga dan Kerja Sama	PPID/Direktur Hubungan Antarlembaga dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
131	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan dengan Sekretaris DPRD Kota Medan tentang	Informasi mengenai kerja sama dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan.	Direktorat Hubungan Antarlembaga dan Kerja Sama	PPID/Direktur Hubungan Antarlembaga dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

	Pelaksanaan PIP dan Wawasan Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan (30 Januari 2026)						
132	Perjanjian Kerja Sama Antara Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan dengan Pekumpulan Prodi Sejarah Se-Indonesia (P3SI) tentang Pelaksanaan PIP melalui Penguatan Sejarah Pancasila (5 Februari 2026)	Informasi mengenai kerja sama dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila melalui penguatan pemahaman, pengkajian, dan pembelajaran sejarah Pancasila bersama Perkumpulan Program Studi Sejarah Se-Indonesia.	Direktorat Hubungan Antarlembaga dan Kerja Sama	PPID/Direktur Hubungan Antarlembaga dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
133	Perjanjian Kerja Sama antara BPIP dan UMY tentang PIP dalam Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi (13 Maret 2026)	Informasi mengenai kerja sama antara BPIP dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila yang diintegrasikan melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan	Direktorat Hubungan Antarlembaga dan Kerja Sama	PPID/Direktur Hubungan Antarlembaga dan Kerja Sama	2026, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

		pengabdian kepada masyarakat במסגרת Tridarma Perguruan Tinggi.					
III. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi							
a. Direktorat Analisis dan Penyelarasan							
134	Jumlah Hasil Analisis dan Penyelarasan terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Indikator Nilai Pancasila	Informasi mengenai jumlah hasil pelaksanaan analisis dan penyelarasan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan indikator nilai-nilai Pancasila.	Direktorat Analisis dan Penyelarasan	PPID/Direktur Analisis dan Penyelarasan	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
135	Jumlah Rekomendasi berupa Surat Keterangan Hasil Penyelarasan terhadap Pembentukan Peraturan Perundangundangan Berdasarkan Indikator Nilai Pancasila	Informasi mengenai jumlah rekomendasi yang diterbitkan dalam bentuk Surat Keterangan Hasil Penyelarasan sebagai hasil analisis kesesuaian pembentukan peraturan perundang-undangan dengan indikator nilai-nilai Pancasila.	Direktorat Analisis dan Penyelarasan	PPID/Direktur Analisis dan Penyelarasan	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
b. Direktorat Advokasi							

136	Jumlah Rekomendasi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila	Informasi mengenai jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan/atau pemangku kepentingan terkait.	Direktorat Advokasi	PPID/Direktur Advokasi	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
137	Data kegiatan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila	Informasi mengenai data pelaksanaan kegiatan advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila, termasuk kegiatan, sasaran, pelaksanaan, dan hasil atau rekomendasi yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Direktorat Advokasi	PPID/Direktur Advokasi	2025, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
c. Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi							
138	Jumlah Hasil Kajian Kebijakan dan Regulasi	Informasi mengenai jumlah hasil kajian terhadap kebijakan dan regulasi yang dilakukan dalam rangka menilai kesesuaian substansi kebijakan	Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi	PPID/Direktur Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku

		dan regulasi dengan nilai-nilai Pancasila.					
139	Jumlah Rekomendasi Berdasarkan Hasil Kajian Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Pancasila.	Informasi mengenai jumlah rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan dan regulasi yang dinilai mengandung substansi yang bertentangan atau tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila, sebagai bahan perbaikan dan penyelarasan kebijakan dan regulasi.	Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi	PPID/Direktur Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
IV. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi							
a. Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila							
140	Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia	Informasi mengenai standar materi Pembinaan Ideologi Pancasila yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembinaan dan penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia.	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	PPID/Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

141	Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Hakim	Informasi mengenai standar materi Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai acuan penguatan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila bagi hakim.	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	PPID/Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
142	Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara	Informasi mengenai standar materi Pembinaan Ideologi Pancasila yang digunakan sebagai acuan dalam penguatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi pegawai Aparatur Sipil Negara.	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	PPID/Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
143	Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	Informasi mengenai buku teks utama Pendidikan Pancasila yang digunakan sebagai bahan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	PPID/Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	2023, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
144	Buku Menemukan Kembali “Api Pancasila”:	Informasi mengenai publikasi buku yang memuat pemikiran	Direktorat Pengkajian Materi	PPID/Direktur Pengkajian Materi	2023, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

	Melalui Pidato-Pidato Bung Karno	dan nilai-nilai Pancasila melalui telaah pidato-pidato Presiden Soekarno sebagai salah satu sumber pemahaman sejarah dan gagasan Pancasila.	Pembinaan Ideologi Pancasila	Pembinaan Ideologi Pancasila			
145	Buku Garuda Pancasila Sejarah Penciptaan Lambang Negara	Informasi mengenai publikasi buku yang mengulas sejarah penciptaan, perkembangan, dan makna Lambang Negara Garuda Pancasila.	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	PPID/Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	2023, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
146	Buku Tafsir Karya-Karya Sukarno Telaah Hermeneutis atas Surat dan Tonil di Ende	Informasi mengenai publikasi buku yang membahas dan menafsirkan karya-karya Sukarno, khususnya surat dan tonil yang berkaitan dengan pemikiran dan perkembangan gagasan Pancasila di Ende.	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	PPID/Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
147	Materi Sosialisasi Tindak Lanjut Tidak Berlakunya TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967	Informasi mengenai materi sosialisasi terkait tindak lanjut perubahan status dan tidak berlakunya TAP	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	PPID/Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

		MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
148	Pidato 1 Juni 2026	Informasi mengenai naskah dan/atau materi pidato dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni Tahun 2026.	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	PPID/Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
149	Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila	Informasi mengenai materi dasar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	PPID/Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	2022, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
b. Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila							
150	Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I: Masa Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK) 29 Mei s.d 1 Juni 1945	Informasi mengenai kumpulan naskah dan dokumen arsip yang merekam proses persidangan pertama BPUPK dalam pembahasan dasar negara, termasuk	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	PPID/Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

		perkembangan gagasan dan pemikiran mengenai Pancasila pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945.					
151	Sigma Pancasila	Informasi mengenai publikasi yang memuat kajian, pemikiran, dan pengembangan pengetahuan terkait Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup bangsa Indonesia.	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	PPID/Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	2020, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
152	Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila	Informasi mengenai arah, tahapan, strategi, dan kerangka pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai panduan dalam mencapai tujuan pembinaan secara terarah dan berkelanjutan.	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	PPID/Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
153	Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	Informasi mengenai arah kebijakan dan prioritas pelaksanaan	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan	PPID/Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

		Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan penguatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.	Ideologi Pancasila	Ideologi Pancasila			
154	Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila	Informasi mengenai gagasan, prinsip, dan nilai dasar Ekonomi Pancasila sebagai landasan pengembangan sistem dan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila.	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	PPID/Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	2022, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
155	Jurnal Pancasila Jurnal Keindonesiaan	Informasi mengenai publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, kajian, dan pemikiran mengenai Pancasila, kebangsaan, dan berbagai aspek keindonesiaan.	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	PPID/Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	2021 sd sekarang, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
156	Jurnal Bhineka Tunggal Ika	Informasi mengenai publikasi ilmiah yang memuat kajian, penelitian, dan pemikiran mengenai	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan	PPID/Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

		keberagaman, persatuan, kebangsaan, dan nilai-nilai Pancasila.	Ideologi Pancasila	Ideologi Pancasila			
157	Ketuhanan Dalam Bingkai Pancasila	Informasi mengenai publikasi yang membahas nilai Ketuhanan dalam perspektif Pancasila serta relevansinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	PPID/Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	2020, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
158	Proceedings of the Conference on Digital Humanities 2022	Informasi mengenai kumpulan artikel dan hasil pembahasan ilmiah dalam konferensi Digital Humanities Tahun 2022 yang berkaitan dengan perkembangan kajian humaniora dan pemanfaatan teknologi digital.	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	PPID/Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	2022, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
159	Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II: Masa Reses dan Masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan	Informasi mengenai kumpulan naskah dan dokumen arsip yang merekam perkembangan pembahasan dasar negara pada masa reses dan masa sidang kedua BPUPK	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	PPID/Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

	(BPUPK) 10 Juli s.d 17 Juli 1945	tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945.					
160	Naskah Rekomendasi Strategi Implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Pada Pendidikan Formal	Informasi mengenai rekomendasi strategi penerapan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dalam penyelenggaraan pendidikan formal sebagai acuan penguatan pemahaman dan pembelajaran nilai-nilai Pancasila.	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	PPID/Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	2023, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
161	Naskah Kajian Identifikasi Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Demokrasi di Indonesia Pasca Reformasi	Informasi mengenai hasil kajian dan identifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan dan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia pada masa pasca reformasi.	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	PPID/Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
162	Naskah Kajian: Strategi Implementasi Pendidikan Pancasila dan Buku Teks Utama Pendidikan	Informasi mengenai hasil kajian strategi penerapan Pendidikan Pancasila dan Buku Teks Utama Pendidikan	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	PPID/Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

	Pancasila pada Satuan Pendidikan di bawah Koordinasi Kementerian Agama	Pancasila pada satuan pendidikan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama.					
163	Laporan Triwulan IV Direktorat Pengkajian Implementasi PIP 2025	Informasi mengenai pelaksanaan program, kegiatan, dan capaian kinerja Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Triwulan IV Tahun 2025.	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	PPID/Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
164	Laporan Triwulan I Direktorat Pengkajian Implementasi PIP 2026	Informasi mengenai pelaksanaan program, kegiatan, dan capaian kinerja Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Triwulan I Tahun 2026.	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	PPID/Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	2026, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
165	Rekap Data Laporan Pajak Direktorat Pengkajian Implementasi PIP 2025	Informasi mengenai rekapitulasi data pelaporan dan administrasi perpajakan atas pelaksanaan	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	PPID/Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	2026, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

		kegiatan Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila selama Tahun 2025.					
V. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan							
a. Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka							
166	Laporan Triwulan IV Tahun 2025 Direktorat Penyelenggaraan Program Paskibraka	Informasi mengenai pelaksanaan program, kegiatan, dan capaian kinerja Direktorat Penyelenggaraan Program Paskibraka pada Triwulan IV Tahun 2025.	Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	PPID/Direktur Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	2026, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
167	Laporan Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Penyelenggaraan Program Paskibraka	Informasi mengenai pelaksanaan program, kegiatan, dan capaian kinerja Direktorat Penyelenggaraan Program Paskibraka pada Triwulan I Tahun 2026.	Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	PPID/Direktur Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	2026, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
168	Data Daerah Yang Memiliki Kepengurusan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI)	Informasi mengenai data daerah yang telah memiliki kepengurusan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia pada	Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	PPID/Direktur Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	2026, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

		tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.					
169	Data Purnapaskibraka Tingkat Pusat mulai Tahun 1967	Informasi mengenai data Purnapaskibraka tingkat pusat sejak penyelenggaraan Program Paskibraka Tahun 1967.	Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	PPID/Direktur Penyelenggaraa n Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	2026, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
170	Jumlah Paskibraka Kabupaten, Provinsi, dan Pusat Tahun 2023 dan 2024	Informasi mengenai jumlah anggota Paskibraka pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat pada Tahun 2023 dan 2024.	Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	PPID/Direktur Penyelenggaraa n Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
171	Data Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Informasi mengenai jumlah Purnapaskibraka yang tergabung dan/atau berperan sebagai Duta Pancasila dalam pelaksanaan Program Paskibraka.	Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	PPID/Direktur Penyelenggaraa n Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
172	Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun	Informasi mengenai ketentuan dan arahan pelaksanaan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagai pedoman	Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	PPID/Direktur Penyelenggaraa n Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

	2025 Tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	bagi pihak terkait dalam penyelenggaraan Program Paskibraka.					
173	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Informasi mengenai peraturan yang mengatur penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagai dasar pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kader Pancasila.	Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	PPID/Direktur Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	2022, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
174	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pertama Kali Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Provinsi Dan Tingkat Kabupaten/Kota	Informasi mengenai ketentuan dan tata cara pengangkatan pertama kali Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.	Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	PPID/Direktur Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
175	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik	Informasi mengenai ketentuan pelaksanaan Program Pasukan	Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan	PPID/Direktur Penyelenggaraan Program Pasukan	2022, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

	Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Pengibar Bendera Pusaka sebagai pedoman teknis penyelenggaraan program sesuai Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022.	Pengibar Bendera Pusaka	Pengibar Bendera Pusaka			
b. Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan							
176	Keputusan Kepala BPIP Nomor 61 Tahun 2024 tentang Cetak Biru Diklat PIP	Informasi mengenai arah, kerangka, dan strategi pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai pedoman penyelenggaraan Diklat PIP.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
177	Keputusan Kepala BPIP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Diklat PIP	Informasi mengenai ketentuan dan tata cara teknis penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
178	Keputusan Kepala BPIP Nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar dan Kurikulum Diklat PIP	Informasi mengenai standar penyelenggaraan dan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

		Ideologi Pancasila sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran.	Pendidikan dan Pelatihan				
179	Keputusan Kepala BPIP Nomor 46 Tahun 2024 tentang Teknis Tata Cara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Diklat PIP	Informasi mengenai ketentuan dan prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
180	Kurikulum Diklat PIP bagi Aparatur Sipil Negara	Informasi mengenai struktur, materi, dan capaian pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
181	Kurikulum Diklat PIP bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Informasi mengenai struktur, materi, dan capaian pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi anggota dan unsur terkait di lingkungan DPRD.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

182	Kurikulum Diklat PIP bagi TNI dan POLRI	Informasi mengenai struktur, materi, dan capaian pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi personel TNI dan POLRI.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
183	Keputusan Kepala BPIP Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggaran Diklat PIP	Informasi mengenai pedoman, persyaratan, dan tata cara akreditasi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
184	Keputusan Kepala BPIP Nomor 60 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar Diklat PIP	Informasi mengenai ketentuan dan tata cara sertifikasi pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
185	Buku Pedoman Pelaksanaan Monev Diklat PIP	Informasi mengenai pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

186	Kurikulum Diklat PIP bagi Kepala Desa	Informasi mengenai struktur, materi, dan capaian pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Kepala Desa.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
187	Kurikulum Diklat PIP bagi Komunitas	Informasi mengenai struktur, materi, dan capaian pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi unsur komunitas dan masyarakat.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
188	Kurikulum Diklat PIP bagi PGRI	Informasi mengenai struktur, materi, dan capaian pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi unsur Persatuan Guru Republik Indonesia.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
189	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis	Informasi mengenai ketentuan teknis dan tata cara penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

	Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan	Ideologi Pancasila sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.	Pendidikan dan Pelatihan				
190	Buku panduan petunjuk pelaksanaan pembelajaran pelatihan bagi calon pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.	Informasi mengenai panduan pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan bagi calon pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
191	Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Purnapaskibraka	Informasi mengenai struktur, materi, dan capaian pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Purnapaskibraka.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
192	Keputusan Kepala BPIP Nomor 19 Tahun 2024 tentang Maheswara Kualifikasi Utama dan Penceramah Kualifikasi Utama	Informasi mengenai penetapan dan ketentuan kualifikasi Maheswara dan Penceramah Kualifikasi Utama dalam penyelenggaraan	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

		Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.					
193	Keputusan Kepala BPIP Nomor 24 Tahun 2024 tentang Maheswara Kualifikasi Madya, Maheswara Kualifikasi Pratama dan Penceramah Kualifikasi Pratama	Informasi mengenai penetapan dan ketentuan kualifikasi Maheswara Madya, Maheswara Pratama, dan Penceramah Pratama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
194	Keputusan Kepala BPIP Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Informasi mengenai ketentuan dan penetapan pengajar yang memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
195	Keputusan Kepala BPIP Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penceramah Utama Angkatan I Tahun 2025	Informasi mengenai penetapan Penceramah Kualifikasi Utama Angkatan I Tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

196	Keputusan Kepala BPIP Nomor 38 Tahun 2025 tentang Maheswara Kualifikasi Utama Angkatan I Tahun 2025	Informasi mengenai penetapan Maheswara Kualifikasi Utama Angkatan I Tahun 2025.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
197	Keputusan Kepala BPIP Nomor 46 Tahun 2025 tentang Maheswara Kualifikasi Pratama Angkatan I Tahun 2025	Informasi mengenai penetapan Maheswara Kualifikasi Pratama Angkatan I Tahun 2025.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
198	Keputusan Kepala BPIP Nomor 51 Tahun 2025 tentang Maheswara Kualifikasi Utama Angkatan II Tahun 2025	Informasi mengenai penetapan Maheswara Kualifikasi Utama Angkatan II Tahun 2025.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
199	Keputusan Kepala BPIP Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penceramah Kualifikasi Utama Angkatan II Tahun 2025	Informasi mengenai penetapan Penceramah Kualifikasi Utama Angkatan II Tahun 2025.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
200	Keputusan Kepala BPIP Nomor 59	Informasi mengenai penetapan	Direktorat Perencanaan,	PPID/Direktur Perencanaan,	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

	Tahun 2025 tentang Maheswara Kualifikasi Madya Angkatan II Tahun 2025	Maheswara Kualifikasi Madya Angkatan II Tahun 2025.	Standardisasi , dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan			
201	Keputusan Kepala BPIP Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penceramah Kualifikasi Madya Angkatan I Tahun 2025	Informasi mengenai penetapan Penceramah Kualifikasi Madya Angkatan I Tahun 2025.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi , dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
202	Keputusan Kepala BPIP Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penceramah Kualifikasi Madya Angkatan I Tahun 2025	Informasi mengenai penetapan Penceramah Kualifikasi Madya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Kepala BPIP Tahun 2025.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi , dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
203	Keputusan Kepala BPIP Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penceramah Kualifikasi Madya Angkatan II Tahun 2025	Informasi mengenai penetapan Penceramah Kualifikasi Madya Angkatan II Tahun 2025.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi , dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
204	Keputusan Kepala BPIP Nomor 58 Tahun 2025	Informasi mengenai penetapan Penceramah	Direktorat Perencanaan, Standardisasi	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi,	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

	tentang Penceramah Kualifikasi Pratama Angkatan II Tahun 2025	Kualifikasi Pratama Angkatan II Tahun 2025.	, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan			
205	Keputusan Kepala BPIP Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penceramah Madya Pratama Angkatan II Tahun 2025	Informasi mengenai penetapan Penceramah sesuai kualifikasi dan angkatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPIP Nomor 41 Tahun 2025.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
206	Keputusan Kepala BPIP Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Informasi mengenai penetapan hasil penilaian akreditasi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
207	Keputusan Kepala BPIP Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Terakreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan	Informasi mengenai penetapan status akreditasi bagi lembaga atau instansi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

	Pembinaan Ideologi Pancasila						
208	Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Informasi mengenai penetapan hasil penilaian akreditasi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
209	Keputusan Kepala BPIP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Terakreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Informasi mengenai penetapan status akreditasi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila berdasarkan hasil penilaian akreditasi Tahun 2025.	Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
c. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan							
210	Informasi data lulusan diklat PIP bagi ASN, POLRI/TNI, dan KML	Informasi mengenai data peserta yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI,	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

		dan kelompok sasaran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.					
211	Informasi data kerjasama penyelenggaraan diklat PIP dengan Lembaga Terakreditasi	Informasi mengenai data kerja sama penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila antara BPIP dengan lembaga penyelenggara yang telah memperoleh status akreditasi.	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
212	Modul materi Dasar diklat PIP (Sejarah Kelahiran, Perumusan, dan Penetapan Pancasila)	Informasi mengenai modul pembelajaran yang memuat sejarah kelahiran, proses perumusan, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
213	Modul materi Dasar diklat PIP (Pokok-Pokok Pikiran Pancasila)	Informasi mengenai modul pembelajaran yang memuat pokok-pokok pemikiran dan nilai fundamental Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat,	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

		berbangsa, dan bernegara.					
214	Modul materi Dasar diklat PIP (Kedudukan Pancasila)	Informasi mengenai modul pembelajaran yang menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa Indonesia.	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
215	Modul materi Dasar diklat PIP (Sistem Ekonomi Pancasila)	Informasi mengenai modul pembelajaran yang membahas prinsip, nilai, dan konsep sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
216	Modul materi Dasar diklat PIP (Demokrasi Pancasila)	Informasi mengenai modul pembelajaran yang membahas prinsip dan penerapan demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
217	Modul materi Dasar diklat PIP (Pembangunan	Informasi mengenai modul pembelajaran yang membahas	Direktorat Pelaksanaan	PPID/Direktur Pelaksanaan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

	Nasional Berdasarkan Pancasila)	konsep, prinsip, dan arah pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan			
218	Modul materi Umum diklat PIP	Informasi mengenai modul pembelajaran yang memuat materi umum sebagai bagian dari pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
219	Modul materi Pengayaan diklat PIP	Informasi mengenai modul pembelajaran yang memuat materi pengayaan untuk memperluas dan memperdalam pemahaman peserta terhadap nilai-nilai dan implementasi Pancasila.	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
220	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan diklat PIP	Informasi mengenai ketentuan, tata cara, mekanisme, dan prosedur teknis pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
221	Sistem Manajemen Mutu	Informasi mengenai sistem, standar, dan	Direktorat Pelaksanaan	PPID/Direktur Pelaksanaan	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

	Direktorat Lakdiklat	mekanisme pengelolaan mutu yang diterapkan oleh Direktorat Lakdiklat dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan			
222	Informasi data lulusan diklat PIP bagi ASN, POLRI/TNI, dan KML	Informasi mengenai data peserta yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, dan kelompok sasaran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
223	Informasi data kerjasama penyelenggaraan diklat PIP dengan Lembaga Terakreditasi	Informasi mengenai data kerja sama penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila antara BPPI dengan lembaga penyelenggara yang	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

		telah memperoleh status akreditasi.					
224	Modul materi Dasar diklat PIP (Sejarah Kelahiran, Perumusan, dan Penetapan Pancasila)	Informasi mengenai modul pembelajaran yang memuat sejarah kelahiran, proses perumusan, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
225	Modul materi Dasar diklat PIP (Pokok-Pokok Pikiran Pancasila)	Informasi mengenai modul pembelajaran yang memuat pokok-pokok pemikiran dan nilai fundamental Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
226	Modul materi Dasar diklat PIP (Kedudukan Pancasila)	Informasi mengenai modul pembelajaran yang menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa Indonesia.	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

227	Modul materi Dasar diklat PIP (Sistem Ekonomi Pancasila)	Informasi mengenai modul pembelajaran yang membahas prinsip, nilai, dan konsep sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
228	Modul materi Dasar diklat PIP (Demokrasi Pancasila)	Informasi mengenai modul pembelajaran yang membahas prinsip dan penerapan demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
229	Modul materi Dasar diklat PIP (Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila)	Informasi mengenai modul pembelajaran yang membahas konsep, prinsip, dan arah pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
230	Modul materi Umum diklat PIP	Informasi mengenai modul pembelajaran yang memuat materi umum sebagai bagian dari pelaksanaan Pendidikan dan	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

		Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.					
231	Modul materi Pengayaan diklat PIP	Informasi mengenai modul pembelajaran yang memuat materi pengayaan untuk memperluas dan memperdalam pemahaman peserta terhadap nilai-nilai dan implementasi Pancasila.	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
232	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan diklat PIP	Informasi mengenai ketentuan, tata cara, mekanisme, dan prosedur teknis pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	2025, Jakarta	Daring	Selama Berlaku
233	Sistem Manajemen Mutu Direktorat Lakdiklat	Informasi mengenai sistem, standar, dan mekanisme pengelolaan mutu yang diterapkan oleh Direktorat Lakdiklat dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.	Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	PPID/Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	2024, Jakarta	Daring	Selama Berlaku

V. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi							
a. Direktorat Pengendalian							
234	Laporan Pemantauan Pengendalian Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila	Informasi mengenai hasil pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila untuk mengetahui perkembangan dan pelaksanaan penanaman, internalisasi, pelebagaan, dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila.	Direktorat Pengendalian	PPID/Direktur Pengendalian	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
235	Laporan Evaluasi Pemantauan Pengendalian Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila	Informasi mengenai hasil evaluasi atas kegiatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai bahan penilaian efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.	Direktorat Pengendalian	PPID/Direktur Pengendalian	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
236	Laporan Pengendalian Pelaksanaan	Informasi mengenai hasil pelaksanaan pengendalian Pembinaan Ideologi	Direktorat Pengendalian	PPID/Direktur Pengendalian	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku

	Pembinaan Ideologi Pancasila	Pancasila, termasuk perkembangan capaian, permasalahan, dan tindak lanjut dalam pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila.					
237	Laporan Pengendalian Internal (D1 s.d D5 - Penanam, Internalisasi, Pelembagaan dan Pembudayaan Nilai Pancasila)	Informasi mengenai hasil pengendalian internal terhadap pelaksanaan tahapan dan/atau dimensi Pembinaan Ideologi Pancasila di lingkungan BPIP, meliputi penanaman, internalisasi, pelembagaan, dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila.	Direktorat Pengendalian	PPID/Direktur Pengendalian	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
238	Laporan Pengendalian External (Objek: Kementerian/Lembaga/Pemda - Penanam, Internalisasi, Pelembagaan dan Pembudayaan Nilai Pancasila)	Informasi mengenai hasil pengendalian pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, khususnya terkait penanaman, internalisasi, pelembagaan, dan	Direktorat Pengendalian	PPID/Direktur Pengendalian	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku

[illegible]

242	Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Pelaksana Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Keputusan Kepala BPIP Nomor 17 Tahun 2020 membentuk Kelompok Kerja di lingkungan BPIP untuk melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19. Dokumen ini mengatur tugas, fungsi, dan tanggung jawab pokja, termasuk koordinasi, pelaksanaan protokol kesehatan, pemantauan, serta evaluasi upaya pencegahan agar kegiatan BPIP tetap berjalan dengan aman dan sesuai ketentuan.	PPID BPIP	PPID BPIP	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku
D. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
243	Surat Keputusan Daftar Informasi yang Dikecualikan	Surat Keputusan tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan merupakan dokumen yang menetapkan jenis-jenis informasi yang tidak dapat	PPID BPIP	PPID BPIP	2026, Jakarta	Daring/ Luring	Selama Berlaku

		diberikan atau dibuka kepada publik. Informasi tersebut dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan karena dapat menimbulkan dampak tertentu apabila dibuka, seperti mengganggu proses penegakan hukum, mengungkap data pribadi, merugikan kepentingan organisasi atau pihak tertentu, maupun menyangkut informasi lain yang secara hukum wajib dirahasiakan.					
--	--	---	--	--	--	--	--

KEPALA,

\${ttd_pengirim}

YUDIAN WAHYUDI